



## Sistem Administrasi Pelayanan E-KTP di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh tengah

Syahraji, Irwan Nasution \*

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area, Indonesia

*Diterima Februari 2013; Disetujui April 2013; Dipublikasikan Juni 2013*

---

### Abstrak

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui implementasi pelayanan E-KTP tersebut. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan dan diperoleh dari buku-buku, artikel, media, dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan implementasi sistem informasi administrasi kependudukan di kecamatan bebesen sudah berjalan dengan cukup baik, walaupun maasih kurang sempurna dikarenakan hambatan-hambatan yang ada. Sedangkan untuk peraturan daerah yang secara khusus mengenai pengelolaan administrasi kependudukan sebagai acuan pelaksanaan di kecamatan ini belum dimiliki ataupun belum ada. Diharapkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam administrasi kependudukan dapat lebih baik dan maksimal, terutama melengkapi pasilitas yang dibutuhkan juga menetapkan peraturan daerah yang secara khusus untuk melaksanakan administaraasi kependudukan di daerah khususnya di kecamatan bebesen.

**Kata kunci :** SIAK; Pelayanan

### Abstract

*The purpose of this research in general is to know the implementation of E-KTP service. The research method used is literature research that collects the necessary data and obtained from books, articles, media, and so forth. The results showed that the overall implementation of population administration information system in bebesen district has been running well enough, although maasih less perfect because of the barriers that exist. As for the regulation daerah specifically on the management of population administration as a reference implementation in this kecamatan not yet owned or not. It is expected that the service to the public, especially in population administration can be better and maximal, especially complementing the needed facilities also set the regional regulations specifically to carry out population administration in the area, especially in bebesen sub-district.*

**Keywords:** SIAK; Service

**How to Cite :** Syahraji, Irwan Nasution (2013). Sistem Administrasi Pelayanan E-KTP di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh tengah  
1 (1): 16-20

---

\*Corresponding author:  
E-mail: [irwannasution@yahoo.com](mailto:irwannasution@yahoo.com)

P-ISSN-2549-9165  
e-ISSN-2580-2011

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi khususnya di bidang informasi pada saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan karena semakin pentingnya informasi dan pengolahan data di dalam aspek kehidupan manusia. Sementara itu sejalan dengan laju gerak pembangunan, organisasi-organisasi public maupun swasta semakin banyak yang mampu memanfaatkan teknologi informasi baru yang dapat menunjang efektivitas, produktivitas, dan efisiensi mereka. Perkembangan teknologi informasi, dalam hal ini computer dapat menunjang pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi modern yang memungkinkan pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi modern dapat diselesaikan secara tepat, akurat, efisiensi.

Para pucuk pimpinan di sebuah organisasi baik public maupun swasta sekarang ini dituntut kemampuannya untuk dapat memanfaatkan informasi yang membanjiri organisasi dan membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut. Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat kini menimbulkan suatu revolusi baru, yaitu peralihan dari sistem kerja yang konvensional ke era digital.

Pada instansi pemerintah, perubahan ini ditandai dengan ditinggalkannya pemerintahan tradisional (*traditional government*) yang identik dengan paper-based administration menuju electronic government atau e-government. Elektronik government atau sering disebut dengan E-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (Junaidi, 2005:51)

E-government menunjuk pada penggunaan teknologi, komunikasi dan informasi, terutama internet, untuk memberikan pelayanan dan pengiriman informasi pemerintah. Melalui E-government, pemerintah akan dikelola

melalui jaringan teknologi yang berbasis data untuk berbagai kepentingan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi public dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana.

Penerapan teknologi informasi (TI) di lingkungan pemerintah mempunyai peranan penting dalam memberikan kemudahan pada berbagai aspek kegiatan pelayanan public. Implementasi TI ke dalam berbagai pelayanan public di lingkungan pemerintah memiliki nilai-nilai strategis, antara lain: implementasi TI dianggap mampu "menaklukkan" kesulitan merubah budaya kerja menjadi lebih baik, implementasi TI juga mampu merombak sebuah sistem kerja agar menuju derajat yang diinginkan, yaitu agar pemerintah menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam memberikan layanannya, kemudian melalui utilisasi TI, pemerintah mampu menghadirkan layanan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Dengan melihat berbagai manfaat yang didapat melalui penerapan e-government tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penerapannya merupakan suatu keharusan dalam rangka menciptakan pelayanan public yang lebih baik. Di Indonesia pengembangan e-government telah diamanatkan oleh pemerintah melalui instruksi presiden No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional. Menurut inpres tersebut "Pengembangan e-government merupakan upaya pengembangan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam meningkatkan kualitas layanan public secara efektif dan efisien. Dalam penyusunan rencana strategis pengembangan e-government dengan memberikan arahan tentang penyusunan rencana e-government

kepada seluruh instansi pemerintah sesuai dengan konteks masing-masing lingkungan instansi tersebut.

Penerapan informasi pada sector public dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat mutlak dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bresford (Dalam Turnip, 2003:21) bahwa dalam globalisasi yang telah bergulir, menuntut penggunaan teknologi Informasi tidak terkecuali pada birokrasi publik. Salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dalam e-government ini diantaranya adalah penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) melalui program E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik).

Pada dasarnya SIK dalam bentuk E-KTP merupakan data kependudukan dari seluruh wilayah Indonesia dalam suatu jaringan integral yang didalamnya semua data kependudukan di daerah-daerah saling terkoneksi. Koneksi SIK melalui E-KTP ini berlangsung mulai dari tingkatan desa, kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota dan provinsi hingga nasional. Oleh karena itu dengan adanya sistem ini data kependudukan dari sabang sampai merauke bisa dilihat dan dimonitor dari pusat.

#### **METODE PENELITIAN**

BH. Ericson (2008:156) dalam bukunya "memahami data statistik untuk ilmu sosial" mengatakan populasi dapat berupa kumpulan dari setiap objek penelitian, pada dasarnya populasi adalah himpunan semua hal (keseluruhan realita sosial) yang ingin diketahui.

Sedangkan sample berarti contoh, yaitu sebagian dari hal yang menjadi objek penelitian. Menurut Sapari Iman Asyari (2003:70) yang dimaksud dengan sample adalah : contoh yang dapat mewakili populasi atau cermin dari keseluruhan objek yang diteliti.

Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya prosedur penelitian : "apabila

subjeknya kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika subjeknya besar maka dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25% atau lebih.

Berdasarkan penjelasan diatas maka yang menjadi populasi sekaligus sample yang penulis ambil adalah semua personil kepegawaian yang terdapat di kantor Camat Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

Penganalisaan data yang diperoleh melalui penelitian harus dilaksanakan hipotesis atas masalah yang telah dirumuskan, sehingga dapat dengan jelas kita simpulkan apakah hipotesis diterima atau tidak. Untuk menganalisa data yang diperoleh maka dipergunakan metode analisa sebagai berikut :

- Analisa deskriptif
- Analisa komparatif

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelayanan public yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau birokrasi saat ini masih jauh dari memuaskan. Bukan saja pelayanan tersebut belum efisien, kurang transparan dan berbelit-belit, tapi juga membuka peluang terjadinya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Padahal, isu pelayanan public memiliki implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan politik.

Masalah administrasi kependudukan adalah masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih, karena masih dirasakan tumpang tindih, tidak ada keterkaitan administrasi antara keberadaan penduduk dengan kebutuhan lain yang sebenarnya atas dasar kependudukan itu sendiri. Kebutuhan yang paling dekat adalah pencatatan sipil, namun demikian belum ada yang secara otomatis dapat mengalir datanya pada pendaftaran penduduk

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu melihat bagaimana implementasi SIK dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya di Kecamatan

Bebesen maka penulis mencoba menggali informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang kependudukan di kantor Kecamatan Bebesen setelah kehadiran SIAK, dan juga dihadapkan dengan pendapat masyarakat tentang pelayanan yang diterima setelah implementasi SIAK di wilayah kecamatan Bebesen.

Beberapa fasilitas yang diberikan aplikasi SIAK adalah :

- Modul aplikasi
- Modul tampilan data
- Modul cari data
- Modul hitung otomatis
- Modul laporan
- Modul manajemen pengguna
- Modul security
- Modul cetak
- Modul status perizinan

Implementasi SIAK di Kecamatan ini tidak atau dapat dikatakan belum sempurna secara keseluruhan, ini dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang ditemui seperti :

- a. Masih lemahnya sumber daya manusia pengelola kependudukan terutama di tataran pelaksana yang merupakan ujung tombak pengelola kependudukan.
- b. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan seperti lahir, mati, pindah dating masih sangat kurang, sehingga data base kependudukan menjadi tidak valid
- c. Diperlukan anggaran yang sangat besar dalam penyediaan perangkat pendukung SIAK
- d. Masih kurangnya pemahaman terhadap teknologi informasi, sehingga pengolahan data masih bersifat manual
- e. Belum adanya peraturan daerah sebagai acuan peraturan yang

dipergunakan dalam implementasi SIAK

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam upaya pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mulai dari tingkat daerah sampai ketinggian pusat adalah suatu sistem informasi yang dapat menampung, mengolah, menyimpan dan menemukan kembali serta mendistribusikan jenis data kependudukan dari segala aspek dan aktifitas organisasi pemerintah terutama dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Bebesen. Sistem informasi kependudukan yang selalu up date sangat dibutuhkan pada suatu pemerintahan. Selama ini metode pengumpulan data dilakukan dengan sensus, maupun survey. Metode ini dirasakan belum memadai untuk memperoleh kebutuhan data dan informasi yang diperlukan dalam menetapkan kebijakan, sehingga dirasakan perlunya standarisasi pengolahan data kependudukan yang terpadu baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah dengan jalan mengembangkan sistem yang baku untuk mengolah informasi kependudukan.

Berdasarkan data-data dan fakta yang di dapat dari lapangan serta dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian, dapat disimpulkan bahwa SIAK di Kecamatan Bebesen menjadi tanggung jawab seksi pemerintah. Struktur organisasi kantor Kecamatan Bebesen sudah cukup jelas sesuai dengan keputusan walikota Medan No. 63 tahun 2001. Di mana didalam keputusan tersebut dikatakan bahwa administrasi kependudukan menjadi tugas dan

tanggung jawab dari seksi pemerintahan.

Di sini juga dikatakan Interpensi yang di artikan sebagai pemahaman dari aparat pelaksana implementasi terhadap pelaksana kebijakan . ini dimaksudkan adalah agar para pelaksana implementasi mengerti apa yang menjadi tugas serta tanggung jawab serta bagaimana melaksanakan tugas serta tanggung jawab tersebut. Dengan demikian para pelaksana implementasi di dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat maksimal.

Hasil wawancara dengan informan penelitian yang dilaksanakan, masalah penerapan dari implementasi belum berjalan dengan baik, hal itu dikarenakan belum adanya Peraturan daerah yang secara khusus untuk pelaksanaan kependudukan di daerah khususnya Kecamatan. Namun hal itu dapat teratasi dengan mengacu pada Permendagri No.28 Tahun 2005. Secara keseluruhan bahwa pelaksanaa Implementasi Sistem Informasi Administrasi kependudukan di Kecamatan Bebesen sudah terlaksana dengan baik, walaupun masih ada sedikit kekurangannya. Dengan demikian diharapkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam administrasi kependudukan dapat lebih baik dan maksimal.

## **SIMPULAN**

Pelaksanaan SIAK di Kecamatan Bebesen sudah secara umum telah mampu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat walaupun masih terdapat kekurangan efisiensi di beberapa hal.

Dampak kehadiran SIAK yang paling dirasakan oleh aparat sebagai pemberi layanan masyarakat sebagai penerima layanan adalah unsur kecepatan dan kesederhanaan pelayanannya. Fasilitas SIAK yang dimiliki khususnya pada Kecamatan masih dirasakan kurang cukup dari segi jumlahnya. Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SIAK ini, yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan yang baik adalah dikarenakan masih minimnya tenaga aparat yang professional dan juga minimnya tingkat kesadaran masyarakat dalaam hal tertib kependudukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Sondang P Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung Jakarta, 2000
- Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito Bandung, 2000
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Soekarno K, dasar-dasar manajemen, Firma Tekad, Jakarta 1995
- Philip kotler, dan Amstrong, *Dasar-dasar Pemasaran*, Gramedia Jakarta, 2004
- Falikhtaun A.E, *Pelayanan Publik dan Permasalahannya*, erlangga, Jakarta 2003
- Sapari Imam Asyari, *Metodologi Penelitian Sosiologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 2003
- M. jenaedi, *Perkembangan teknologi dan pelayanan masyarakat*, Erlangga, Jakarta 2005
- Alikandu Turnip, *Teknologi dan Perkembangan Informasi*, Sinar Grafika, Jakarta 2003
- Ericson BH dan T Namsamchue, *Memahami Statistik untuk Ilmu Sosial*, LP3ES, Jakarta 2008